LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN MARET DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 10 April 2023

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 23,20 %

b. Keuangan = 4.431.463.934 (18,97%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.250.000			1.183.000		
1	Konsultasi dan Koordinasi	33.250.000	4	3,50	1.183.000	(0,50)	Menyesuikan kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	30.945.000			565.000		
1	Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota	22.305.000	100	0	565.000	(100)	diundur sampai ada finalisasi instrument penilaian dan petunjuk teknis lebih lanjut terkait APE dari KemenPPPA
2	Rapat Koordinasi Pokja PUG Provinsi	8.640.000	100	0	0	(100)	diundur sampai ada finalisasi instrument penilaian dan petunjuk teknis lebih lanjut terkait APE dari KemenPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	34.136.000			2.568.000		
1	Pelaksanaan Penguatan dan Konsultasi Kebijakan Perlindungan Perempuan	34.136.000	8,79	7,52	2.568.000	(1,27)	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	108.750.000			8.863.000		
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	108.750.000	22,19	14,40	8.863.000	(7,79)	sesuai dengan kebutuhan pendampingan korban kekerasan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1.946.000			1.936.000		
1	Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan Fasilitator SAPA	1.946.000	100	99,40	1.936.000	(0,60)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.800.000			1.400.000		
1	Pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Bimbingan Masyarakat	10.800.000	31,49	12,96	1.400.000	(18,53)	Rapat Koordinasi Puspaga akan dialihkan di bulan Mei
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	207.840.000			2.000.000		
1	Dialog Anak Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	207.840.000	13,88	0,96	2.000.000	(12,92)	Anak-anak UTS dan menyesuaikan agenda narasumber DPRD Jateng
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	56.820.000			0		
1	Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB bersama IBI	56.820.000	0,85	0	0	(0,85)	Rapat persiapan akan dilaksanakan pada bulan April dan pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000			57.886.500		
1	Penguatan Peran Serta Bkow Provinsi Jawa Tengah Dalam	150.000.000	26,82	22,73	34.095.000	(4,09)	

	Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan						
2	Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Berbasis Gender	125.000.000	18,66	17,91	23.791.500	(0,75)	

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	11	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan :

Terdapat kegiatan yang mengalami deviasi negatif yaitu :

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Konsultasi dan Koordinasi;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Pokja PUG Provinsi;
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Penguatan dan Konsultasi Kebijakan Perlindungan Perempuan;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan Fasilitator SAPA;
6. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Bimbingan Masyarakat;
7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Dialog Anak Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Anak;
8. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB bersama IBI;
9. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penguatan Peran Serta Bkow Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan dan Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Berbasis Gender;
10. Masih ada permasalahan pada data tribina di NEW SIGA (Dalduk KS);
11. Masih kurang 1 pergub RAD Perlindungan Anak (di dalamnya tentang KLA) (seksi PA);
12. Belum ada kesamaan standart layanan di kab/kota (SPT).

Upaya

1. Meminta data secara langsung ke kab/kota (Dalduk KS);
2. Melakukan rapat koordinasi pembahasan RAD Perlindungan Anak (seksi PA);

3. Mendorong kab/kota untuk melaksanakan standar layanan sesuai permenPPA no 2 tahun 2022 melalui rakor/pelatihan (seksi PA).

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana kegiatan bulan April:

1. Monev implementasi kebijakan melalui Rumah Dataku di Kampung KB (Dalduk KS);
2. Monev Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SMA/SMK di kab/kota (Dalduk KS);
3. Monev kegiatan kelompok tribina dan Pik-R (Dalduk KS);
4. Monev pengembangan usaha kelompok UPPKA (Dalduk KS);
5. Penguatan dan konsultasi kebijakan perlindungan perempuan (seksi PP);
6. Pemantauan dan pengawasan penyediaan layanan di kab/kota (seksi PP);
7. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (SPT);
8. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (SPT).

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Maret 2023, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin, 10 April 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001